



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan,
Jakarta Selatan 12940, P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili 021-5252975
Laman: <http://www.itjen.kemenkumham.go.id>, Email: itjen@kemenkumham.go.id

Nomor : ITJ.PW.05.01.I-26
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Hal : Informasi Hasil Reviu RKA-K/L Pagu
Alokasi Anggaran TA. 2022 Pada
Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia.

29 Oktober 2021

Yth. Sekretaris Inspektorat Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Di -
Jakarta

Merujuk Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: ITJ.KP.04.01.1-117 tanggal 7 Oktober 2021 perihal Reviu atas Pagu Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022, Tim telah mereviu dengan uraian hasil reviu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Reviu Nomor: ITJ.2.PW.03.01-92/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

Berdasarkan hasil reviu, masih ditemukan permasalahan yang memerlukan penanganan dan penertiban yaitu terdapat alokasi biaya pemeliharaan gedung berupa rumah jabatan Eselon I (Inspektur Jenderal) sebesar Rp Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdaftar pada SIMAK-BMN Sekretariat Jenderal belum disertai data pendukung.

Atas permasalahan tersebut, diminta agar Saudara melengkapi data pendukung biaya pemeliharaan rumah jabatan Eselon I.

Ketidaktertiban tersebut, setelah dilakukan perbaikan disampaikan kepada kami selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah 1 November 2021.

Demikian untuk menjadi periksa.



Inspektur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU

NIP. 19651128 199103 1 002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

INSPEKTORAT JENDERAL



LAPORAN HASIL REVIU RKA-K/L PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022 PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : ITJ.2.PW.03.01-92/X/2021

TANGGAL : 27 Oktober 2021

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

A. Ringkasan Eksekutif	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu	3
D. Metodologi Reviu	4
E. Jadwal dan Susunan Tim Reviu	4
F. Gambaran Umum Obyek Reviu	4
G. Hasil Reviu	9
H. Rekomendasi	11
I. Apresiasi	11



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan,
Jakarta Selatan 12940, P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili 021-5252975
Laman: <http://www.itjen.kemenkumham.go.id>, Email: itjen@kemenkumham.go.id

Nomor : ITJ.2.PW.03.01-92/X/2021 27 Oktober 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Biasa
Hal : Laporan Hasil Reviu RKA-K/L Pagu
Alokasi Anggaran TA. 2022 Pada
Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia

Menindaklanjuti Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : ITJ.KP.04.01.1-117 tanggal 7 Oktober 2021, kami telah melaksanakan Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan uraian hasil reviu sebagai berikut:

A. Ringkasan Eksekutif

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L). Siklus penyusunan RKA-K/L dimulai dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional oleh Presiden, yang selanjutnya akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Berdasarkan penetapan ini, K/L mengevaluasi *baseline* (angka dasar) dan mengajukan usulan inisiatif baru. Menteri Keuangan selanjutnya menetapkan Pagu Anggaran K/L untuk penyusunan RKA-K/L. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dan Renja K/L.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dilakukan penelitian oleh Sekretariat Jenderal dan dilakukan reviu oleh APIP untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) dan memastikan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran yang difokuskan pada kelayakan anggaran, kepatuhan penarapan penganggaran, kelengkapan dokumen pendukung dan kelayakan dan kesesuaian rincian anggaran yang digunakan.

Sesuai Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: ITJ.KP.04.01.1-117 tanggal 7 Oktober 2021 kami telah melakukan reviu atas Pagu Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022. Reviu dilaksanakan pada saat Penyusunan RKA-K/L oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM setelah ditetapkannya Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan program Dukungan Manajemen (013.02.WA) sebesar Rp76.877.008.000 (tujuh puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal sebesar Rp38.770.439.000 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan kegiatan pengawasan kinerja Inspektorat Wilayah

sebesar Rp38.106.569.000 (tiga puluh delapan milyar seratus enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Dari hasil revidi Pagu Alokasi Anggaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pagu alokasi anggaran yang disusun telah memenuhi kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM TA 2022 secara umum telah mematuhi kaidah-kaidah penganggaran;
3. Konsistensi mencantumkan sasaran kinerja yang meliputi sasaran, indikator, volume keluaran (*output*) program dan kegiatan dan indikator kinerja dalam RKA-K/L telah sesuai dengan sasaran kinerja dalam RKP dan Renja K/L;
4. Pagu Alokasi Anggaran dalam RKA-K/L telah sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran K/L per program dan fungsi;
5. Terdapat alokasi biaya pemeliharaan gedung berupa rumah jabatan Eselon I (terdaftar pada SIMAK-BMN Sekretariat Jenderal) belum disertai data pendukung;
6. Berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor: ITJ.1.UM.01.01-3318 tanggal 08 Oktober 2021 akan melakukan revisi atas RKBMN TA 2022, mencakup:
 - a. Pengadaan:
 - 1) Meteran Digital sebanyak 6 unit @Rp5.257.000,00 total Rp31.542.000,00;
 - 2) Kamera Digital sebanyak 6 unit @Rp22.000.000,00 total Rp132.000.000,00;
 - 3) Tripod Kamera sebanyak 6 unit @Rp2.200.000,00 total Rp13.200.000,00;
 - 4) Camera Conference sebanyak 8 unit @Rp3.990.000,00 total Rp31.920.000,00;
 - 5) Sice sebanyak 1 unit @Rp40.000.000,00 total Rp40.000.000,00;
 - 6) Meja Makan Kayu sebanyak 2 unit @Rp14.900.000,00 total Rp29.800.000,00;
 - 7) Kasur/Spring Bed sebanyak 2 unit @Rp13.000.000,00 total Rp26.000.000,00;
 - 8) AC Split sebanyak 4 unit @Rp6.100.000,00 total Rp24.400.000,00;
 - 9) Podcast Set sebanyak 1 unit @Rp32.300.000,00 total Rp32.300.000,00;
 - 10) Meja Rapat sebanyak 1 unit @Rp30.000.000,00 total Rp30.000.000,00;
 - 11) Mesin Absensi Wajah, pada Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang tercantum pengadaan sebanyak 2 unit @Rp16.560.000,00 namun total tercantum Rp66.240.000,00, sedangkan pada Rincian Kertas Kerja Satker tercantum pengadaan sebanyak 4 unit @Rp16.560.000,00 total Rp66.240.000,00.
 - 12) Sound System Auditorium sebanyak 1 unit @Rp80.000.000,00 total Rp80.000.000,00;
 - 13) Sound System Gedung sebanyak 1 unit @Rp30.921.000,00 total Rp30.921.000,00;
 - 14) Kitchen Set sebanyak 2 unit @Rp15.000.000,00 total Rp30.000.000,00.
 - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa microbus/kendaraan roda 6 dengan volume 1 UT @ Rp37.110.000,- total Rp37.110.000,- .

Dengan mempertimbangkan beberapa catatan yang telah diungkapkan dalam Catatan Hasil Reviu bahwa belum seluruhnya catatan hasil reviu ditindaklanjuti melalui perbaikan/koreksi, namun demikian secara umum RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2022 telah disusun sesuai dengan kaidah- kaidah perencanaan penganggaran.

B. Dasar Hukum

1. Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2022;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
3. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
4. Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH.PR.01.04-22 tanggal 27 Juli 2021 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan hal Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022;
5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: SEK.PR.01.04-79 tanggal 7 Oktober 2021 hal Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA. 2022;
6. Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: ITJ.KP.04.01.1-117 Tanggal 7 Oktober 2021.

C. Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu

Tujuan Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L adalah untuk memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Renja K/L, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya, dan memenuhi kaidah perencanaan penganggaran serta dilengkapi dokumen pendukung. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan K/L dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*.

Ruang lingkup Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L unit eselon I dan penelusuran RKA-K/L unit eselon I ke dokumen sumber yang dilakukan secara terbatas pada TOR, RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya. Ruang lingkup reviu RKA-K/L tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern pengujian atas respon permintaan keterangan yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

D. Metodologi Reviu

1. Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia telah diterbitkan oleh AAIP Nomor KEP-005/AAIPUDPN/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
2. Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan data dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana keuangan data serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA-K/L Inspektorat Jenderal Tahun 2022.

E. Jadwal dan Susunan Tim Reviu

Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Inspektorat Jenderal dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja mulai dari tanggal 17 Oktober s.d 27 Oktober 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan : 07 s.d 08 Oktober 2021
2. Pelaksanaan : 11 s.d 19 Oktober 2021
3. Pelaporan : 21 s.d 27 Oktober 2021

dengan susunan tim sebagai berikut:

1. Ahmad Rifai : Penanggung Jawab
2. Lely Nurachmi : Pengendali Teknis
3. Tessa Leo Marlino : Ketua Tim
4. Mulyani Fitri : Anggota
5. Rizky Herviani : Anggota
6. Reni Melynda Hutapea : Anggota
7. Siti Afifah : Anggota

F. Gambaran Umum Obyek Reviu

1. Data Umum

Pagu Alokasi Anggaran TA 2022 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Program pada Dukungan Manajemen sebesar Rp76.877.008.000,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanja sebagai berikut:

Sumber Dana	Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah)			Jumlah (dalam ribuan rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
Rupiah Murni	18.279.385	53.439.465	5.158.158	76.877.008
PNBP	0	0	0	0
Jumlah	18.279.385	53.439.465	5.158.158	76.877.008

Dari Pagu Anggaran tersebut, dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal sebesar Rp38.770.439.000 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

dan kegiatan pengawasan kinerja Inspektorat Wilayah sebesar Rp38.106.569.000 (tiga puluh delapan milyar seratus enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). dengan rincian kegiatan:

Program Dukungan Manajemen (Kode Satker 409241)			76,877,008,000
013.02.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
1563.	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I		5,599,719,000
KRO	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen)		5,599,719,000
RO	965. Layanan Audit Internal		5,599,719,000
	051.	Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	2,857,972,000
	052.	Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	46,871,000
	053	Pemantauan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	218,738,000
	054	Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	656,547,000
	055	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I (Prioritas K/L)	993,677,000
	056	Pendampingan Satker di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	627,810,000
	057	Pelatihan Kantor Sendiri / Gemar Belajar dengan Tema Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	192,424,000
	058	Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	5,680,000
1564.	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II		5,599,719,000
KRO	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen)		5,599,719,000
RO	965. Layanan Audit Internal		5,599,719,000
	051.	Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	2,659,127,000
	052.	Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	331,213,000
	053	Pemantauan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	305,628,000
	054	Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	530,942,000
	055	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II (Prioritas K/L)	1,108,620,000
	056	Pendampingan Satker di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	517,801,000
	057	Pelatihan Kantor Sendiri / Gemar Belajar dengan Tema Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	125,719,000
	058	Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	20,669,000
1565.	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III		5,599,719,000
KRO	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen)		5,599,719,000
RO	965. Layanan Audit Internal		5,599,719,000
	051.	Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat	2,507,547,000

		Wilayah III	
	052.	Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	501,053,000
	053	Pemantauan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	210,807,000
	054	Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	662,333,000
	055	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III (Prioritas K/L)	1,042,760,000
	056.	Pendampingan Satker di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	605,214,000
	057	Pelatihan Kantor Sendiri / Gemar Belajar dengan Tema Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	61,080,000
	058	Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	8,925,000
1566.		Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	5,599,719,000
KRO		EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen)	5,599,719,000
RO		965. Layanan Audit Internal	5,599,719,000
	051	Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	2,694,468,000
	052	Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	979,457,000
	053	Pemantauan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	180,757,000
	054	Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	121,826,000
	055	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV (Prioritas K/L)	1,072,169,000
	056	Pendampingan Satker di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	487,973,000
	057	Pelatihan Kantor Sendiri / Gemar Belajar dengan Tema Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	59,990,000
	058	Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	3,079,000
1567.		Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	5,599,719,000
KRO		EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen)	5,599,719,000
RO		965. Layanan Audit Internal	5,599,719,000
	051	Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	2,522,456,000
	052	Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	489,520,000
	053	Pemantauan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	187,820,000
	054	Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	483,493,000
	055	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V (Prioritas K/L)	1,123,901,000
	056	Pendampingan Satker di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	721,129,000
	057	Pelatihan Kantor Sendiri / Gemar Belajar dengan Tema Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat	58,779,000

		Wilayah V	
	058	Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	12,621,000
1568.		Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	10,107,977,000
KRO		EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen)	10,107,977,000
RO		965. Layanan Audit Internal	10,107,977,000
	051.	Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	2,690,671,000
	052.	Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	103,234,000
	053	Pemantauan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	300,871,000
	054.	Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	247,280,000
	055	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI (Prioritas K/L)	3,713,948,000
	056	Pendampingan Satker di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	822,724,000
	057	Pelatihan Kantor Sendiri / Gemar Belajar dengan Tema Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	129,382,000
	058	Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	6,595,000
	059	Pengawasan Kinerja dan Keuangan Satker Luar Negeri	1,673,404,000
	060	Koordinasi Pimpinan Tinggi ke KBRI/KJRI/KDEI	419,868,000
1569.		Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	38,770,436,000
KRO 1		Layanan Dukungan Manajemen Internal	29.098.984.000
RO 1		Layanan Perkantoran	25,298,872,000
	001.	Gaji dan Tunjangan	18,279,385,000
	002.	Operasional Kantor	7,019,487,000
RO 2		956. Layanan BMN	137,616,000
	051	Pengelolaan BMN	56,856,000
	052	Pengelolaan Barang dan Jasa (UKPBJ/LPSE/SIRUP)	80,760,000
RO 3		958. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	270,140,000
	051.	Penyelenggaraan Kehumasan dan peliputan kegiatan pimpinan	239,028,000
	052	Pengelolaan Kepustakaan/JDIH/PPID	31,112,000
RO 4		959. Layanan Protokoler	1,479,514,000
	051.	Pengelolaan Tata Usaha Pimpinan dan Protokoler	140,014,000
	052	Koordinasi Pengawasan/Pembinaan Pimpinan	1,339,500,000

RO 5	960. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	211,030,000
	051. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	25,811,000
	052. Pengelolaan Kelembagaan, Tatalaksana, Proses Bisnis dan SOP	185,219,000
RO 6	962. Layanan Umum	1,172,884,000
	051. Pengelolaan Tata Usaha	21,064,000
	052. Pengelolaan Rumah Tangga dan Perlengkapan	1,151,820,000
RO 7	963. Layanan Data Informasi	528,928,000
	051. Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi	213,840,000
	052. Pengelolaan Database Hasil Pengawasan Internal	272,561,000
	053. Pengelolaan Database Hasil Pemeriksaan Eksternal	42,527,000
KRO 2	EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (unit)	5,158,158,000
RO	951. Layanan Sarana Internal	5,158,158,000
	051. Pengadaan Kendaraan bermotor	1,539,487,000
	052. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	3,618,671,000
KRO 3	EBC. Layanan Manajemen SDM Internal (orang)	1,470,818,000
RO	954. Layanan Manajemen SDM	1,470,818,000
	051. Administrasi Kepegawaian	30,775,000
	052. Pengembangan Kepegawaian	1,142,307,000
	053. Mutasi / Promosi / Pemberhentian Pegawai	297,736,000
KRO 4	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen)	3,042,476,000
RO 1	952. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	137,093,000
	051. Penyusunan Rencana Program	22,393,000
	052. Penyusunan Rencana Anggaran	114,700,000
RO 2	953. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,750,705,000
	051. Pengelolaan Laporan Berkala	57,226,000
	052. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Unit Inspektorat Jenderal	1,693,479,000
RO 3	955. Layanan Manajemen Keuangan	420,300,000
	051. Pengelolaan Keuangan	383,434,000
	052. Pengelolaan Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan	36,866,000
RO 4	961. Layanan Reformasi Kinerja	639,622,000
	051. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	139,622,000
	052. Pencegahan, Penindakan, Yustisi dan Kesekretariatan UPP Kemenkumham	500,000,000
RO 5	974. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	94,756,000
	051. Pengelolaan Persuratan dan Tata Naskah Dinas	24,756,000
	052. Pengelolaan Kearsipan	70,000,000

2. Proses Penyusunan RKA-K/L

Inspektorat Jenderal selaku Unit Eselon I telah melakukan penyusunan RKA-K/L dan dilakukan revidi secara paralel sesuai jadwal yang telah ditentukan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal.

3. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L Program Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal RKAK/L Tahun 2022 mengacu pada Postur dan aplikasi SAKTI yang telah ditetapkan.

G. Hasil Revidi

1. Kelayakan Anggaran Untuk Menghasilkan Suatu Keluaran (*Output*) Kegiatan

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam penyusunan RKA K/L TA.2022 secara umum telah memenuhi kriteria keluaran (*Output*) kegiatan sebagai berikut:

- a. Telah mencerminkan sasaran kinerja satker sesuai dengan tugas fungsi;
- b. Telah mencerminkan kegiatan penugasan yang menghasilkan keluaran (*output*);
- c. Sumber dana dalam RKA K/L telah sesuai dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Alokasi Anggaran K/L;
- d. Rincian Kertas Kerja Satker telah sesuai dengan Postur Anggaran TA. 2022.

2. Kepatuhan Dalam Penerapan Kaidah-Kaidah Penganggaran

Dari hasil pengujian terbatas diketahui bahwa penyusunan RKA-K/L TA. 2022 telah memperhatikan kaidah-kaidah penganggaran antara lain: kesesuaian dengan Standar Biaya Masukan TA.2022, Postur Anggaran, MAK, dan keselarasan KAK dan RAB dengan RKA-K/L.

3. Kelengkapan Dokumen Pendukung

Inspektorat Jenderal telah melengkapi dokumen pendukung berupa:

- a. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: SEK.PR.01.04-78 tanggal 7 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Para Pimpinan Unit Eselon I hal penyampaian pagu alokasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM TA. 2022;
- b. Surat Pernyataan Pejabat Eselon I Nomor: ITJ.PR.01.04-30 tanggal Oktober 2021 yang menyatakan bahwa RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Itjen dalam proses revidi APIP;
- c. Surat Persetujuan Pejabat Eselon I Nomor: ITJ.PR.01.04-31 tanggal Oktober 2021 yang menyatakan persetujuan pengadaan kendaraan dinas operasional;
- d. Postur Anggaran Inspektorat Jenderal TA 2022;
- e. Daftar Pagu Anggaran Per Satker TA. 2022;
- f. Daftar Barang SIMAK BMN;
- g. Rencana Anggaran Tingkat K/L TA. 2022;
- h. Rencana Kerja Anggaran Satker TA 2022 Bagian A;
- i. Rencana Kerja Anggaran Satker TA 2022 Bagian B;
- j. Rincian Kertas Kerja Satker TA 2022;
- k. Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (TOR);
- l. Rincian Anggaran Belanja;

- m. Dokumen Hasil Penelaahan RKBMN Tahun 2022;
- n. Surat Keterangan Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor: ITJ.1.UM.01.01-3318 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Revisi RKBMN TA 2022;
- o. SK Pengelola Keuangan Tahun 2021 dan SK Pengelola SAI;
- p. Kartu Identitas Barang (KIB) Bangunan Gedung Rumah Negara;
- q. Dokumen data dukung pengadaan sarana prasarana Itjen TA. 2022 (spesifikasi dan pricelist);
- r. Dokumen SPK Anti Virus Tahun 2021 (sebagai acuan biaya TA. 2022);

Dokumen yang belum dilengkapi:

Dokumen hasil penelitian RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal.

4. Konsistensi Kesesuaian dengan RKP dan Renja K/L

Konsistensi sasaran kinerja meliputi sasaran, indikator, volume keluaran (output) program dan kegiatan dan indikator kinerja dalam RKA-K/L sesuai Renja K/L dan RKP. Rencana Kerja disusun melalui aplikasi KRISNA yang terintegasi dengan RKA-K/L.

5. Kesesuaian dengan Pagu Alokasi Anggaran K/L (Untuk Reviu RKA-K/L atas Penyusunan RKA-K/L)

Pagu Anggaran dalam RKA-K/L dan Rincian Kertas Kerja Satker Inspektorat Jenderal TA. 2022 telah sesuai Pagu Anggaran TA. 2022 yang termuat di dalam surat Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH.PR.01.04-22 tanggal 27 Juli 2021 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan hal Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022.

6. Kesesuaian dengan Alokasi Anggaran K/L (Untuk Reviu RKA-K/L atas Penyesuaian RKA-K/L)

Rincian alokasi anggaran dalam RKA-K/L TA 2022 telah sesuai dengan Matrik Rincian Pagu Per Kegiatan/KRO/RO/Komponen Inspektorat Jenderal TA 2022.

7. Kepatuhan Biaya Pemeliharaan Kendaraan/Sarana Kantor

- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa kendaraan senilai Rp676.100.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Kendaraan roda 4 dengan volume 18 UT @Rp30.000.000,00 total Rp540.000.000,00 (Data pada SIMAK BMN dan Hasil Penelaahan RKBMN TA 2022 telah sesuai)
 - 2) Kendaraan roda 6 dengan volume 2 UT @37.110.000.000,00 total Rp74.220.000,00 (Data pada SIMAK BMN telah sesuai terdapat 2 unit kendaraan roda 6 dalam keadaan baik, namun pada dokumen Hasil Penelaahan RKBMN TA 2022 hanya mencantumkan kebutuhan pemeliharaan untuk 1 unit). Berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor: ITJ.1.UM.01.01-3318 tanggal 08 Oktober 2021 akan melakukan revisi atas RKBMN TA 2022, mencakup pemeliharaan microbus/kendaraan roda 6 senilai Rp37.110.000,00;

- 3) Kendaraan roda 2 dengan volume 17 UT @Rp3.640.000,00 total Rp61.880.000,00 (Data pada SIMAK BMN dan Hasil Penelaahan RKBMN TA 2022 telah sesuai).
- b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa sarana kantor antara lain:
Pemeliharaan sistem informasi lisensi server security 1 paket senilai Rp50.000.000,00 telah disertai data dukung berupa dokumen pemesanan dan pembayaran lisensi tahun 2021.

8. Kepatuhan biaya pemeliharaan Gedung/kantor yang ditempati Bersama

Terdapat belanja pemeliharaan gedung dan bangunan senilai Rp51.700.000,- yang terdiri dari:

- a. Rumah Jabatan Eselon I (250 m² x 1 unit) senilai Rp27.500.000,00 (tidak terdapat dalam data SIMAK BMN dan dokumen hasil penelaahan RKBMN TA 2022). Rumah Jabatan Eselon I terdaftar pada SIMAK BMN Sekretariat Jenderal namun biaya pemeliharaan dapat dibebankan pada RKA-K/L Inspektorat Jenderal (surat pendukung belum dilengkapi);
- b. Rumah Dinas Gol I (120 m² x 1 unit) senilai Rp13.200.000,00 (Data pada SIMAK BMN dan Hasil Penelaahan RKBMN TA 2022 telah sesuai);
- c. Rumah Dinas Gol II (50 m² x 2 unit) senilai Rp11.000.000,00 (Data pada SIMAK BMN dan Hasil Penelaahan RKBMN TA 2022 telah sesuai).

H. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA. 2022 pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, direkomendasikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar melengkapi data dukung sebagaimana hasil reviu.

I. Apresiasi

Tim Reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh Pejabat/pegawai pada Inspektorat Jenderal atas kesediaannya memberikan data/ dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA. 2022 pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikian kami sampaikan, untuk perkenan Bapak Inspektur Jenderal.



Inspektur Wilayah I,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ahmad Rifai

NIP. 19621213 198603 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.